

**PENINGKATAN KETRAMPILAN MELALUI PELATIHAN
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SANTRIWATI
DI KABUPATEN BANGKALAN**

**Oleh :
S Anugrahini Irawati
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prodi Manajemen
anugrahini.1962@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi masalah santriwati setelah keluar dari pondok pesantren terjun ke masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana minat para santriwati di Bangkalan terhadap upaya peningkatan kualitas melalui pemberdayaan perempuan. 2). Pekerjaan atau jabatan apa yang diminati para santriwati di Bangkalan setelah keluar dari pondok pesantren. 3). Bagaimana pandangan para santriwati terhadap upaya pemberdayaan perempuan di Bangkalan. 4). Apakah harapan-harapan dari para santriwati dalam upaya peningkatan kualitasnya. 5). Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh santriwati dalam melaksanakan tugasnya kelak setelah keluar dari pondok pesantren.

Hasil penelitian juga diperoleh bahwa sebanyak 470 orang berminat menjadi wirausaha (berwirausaha). Dengan demikian maka penyelesaiannya adalah dengan memberikan pelatihan seperti, memasak (tata boga), menjahit, merias dan handycraft.

Kata kunci : santriwati, pelatihan, wirausaha

Pendahuluan

Akhir-akhir ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat (Saptari, 1997: 7).

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi, baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan (gender). Akibatnya, angka buta huruf dikalangan perempuan cukup tinggi, pengangguran dan upah yang diterima pekerja perempuan cukup rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karenanya untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan

gender maka perlu adanya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi gender.

Lies Markus : “Wajah kemiskinan adalah wajah perempuan. Jadi pemberdayaan kaum miskin otomatis merupakan pemberdayaan kaum perempuan”. Hal ini mempunyai makna bahwa: pertama, pemberdayaan kaum miskin itu harus menasar kepada kaum perempuan. Yang kedua, karena secara sosial tanggung jawab kesehatan, pendidikan anak-anak, itu masih dibebankan kepada perempuan. Mungkin nanti lain halnya jika tanggung jawab itu sudah dibebankan secara sosial kepada kaum laki-laki dan laki-laki secara seimbang, pemberdayaannya bisa berbeda kembali. Tapi saat ini secara praktis memang yang bertanggung jawab atas makanan, kesehatan atau pendidikan terutama yang paling dasar adalah perempuan. "Sering dikatakan dalam statistik dunia kalau kita menolong satu orang perempuan, berarti bantuan itu menolong empat anggota keluarga. Jika ingin mengakhiri kemiskinan harus melalui tangan perempuan, karena justru wajah kemiskinan adalah wajah perempuan, yang kedua karena dari segi matematis dia bisa menolong atau bisa membantu empat kali lipat daripada diberikan kaum lelaki."

Selanjutnya Dita Indah Sari menyebutkan, mahalnya biaya pendidikan adalah malapetaka, karena membuat kelompok perempuan menjadi sangat rendah daya tawarnya serta rentan akan tindak kekerasan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI kita yang ditempatkan di sektor formal di luar negeri. Selebihnya, yaitu 89,25% terdampar ke sektor informal. Di sektor informal ini, 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan, yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan hanya 14,9% perempuan yang lulus SMA, dan 2,8% lulus Diploma dan Strata 1-3, maka 83% perempuan Indonesia hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau malah tidak berijazah sama sekali alias tidak pernah sekolah. Selain putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan.

Dengan kualifikasi semacam ini, jangan harap kaum perempuan bisa memiliki kesetaraan posisi tawar di pasar tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Lalu, pada saat yang bersamaan, para pengusaha dan pemerintah mengeluhkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja kita, dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina, sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif. Ini merupakan pernyataan lempar batu sembunyi tangan, karena policy ekonomi pemerintahlah yang menciptakan situasi ini, ditambah kebijakan upah murah yang membuat buruh sukar meningkatkan skillnya. Di dalam negeri

pun, 70% tenaga perempuan bekerja di sektor informal (44%-nya adalah pembantu rumah tangga), yang rendah keterampilan, minim upah serta tanpa perlindungan hukum.

Kondisi perempuan di atas juga dirasakan dalam kehidupan perempuan Madura. Dimana keterbelakangan perempuan Madura telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah. Akibatnya, akses dan partisipasi perempuan Madura dalam bidang pembangunan politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami kemerosotan.

Menurut Usman (1998) kurangnya wanita menempati posisi-posisi kunci dalam organisasi politik (badan legislatif maupun birokrasi pemerintahan) disebabkan oleh karakteristik personal dan aspek organisasional, terutama sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian sosial yang melembaga dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kita, perjanjian sosial yang mengatur peranan tersebut masih dibingkai oleh sebuah sistem yang lazim disebut *patriarchal*, yaitu: *Pertama*, suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan kaum pria pada peran yang lebih dominan. *Kedua*, faktor kemauan/keinginan, *Ketiga*, faktor iklim yang tidak kondusif.

Bila kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka perempuan yang diharapkan sebagai elemen penting untuk berperan aktif dalam pembangunan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya terpadu dalam rangka memberdayakan perempuan dalam upaya peningkatan kualitas perempuan di Madura, baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, hukum, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

Masyarakat Madura yang sangat kental dengan ikatan religius Islam-nya, memandang perempuan sebagai tiang negara yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan suatu bangsa. Pada tangan perempuanlah suatu negara akan baik, dan pada perempuan pula suatu negara akan runtuh. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan keturunan mereka sebagai penerus bangsa. Pendidikan, pembinaan moral dan akhlak anak merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan di atas, maka dapat digambarkan permasalahan yang muncul:

1. Bagaimana minat para santriwati di Bangkalan terhadap upaya peningkatan kualitas melalui pemberdayaan perempuan.
2. Pekerjaan atau jabatan apa yang diminati para santriwati di Bangkalan setelah keluar dari pondok pesantren.

3. Bagaimana pandangan para santriwati terhadap upaya pemberdayaan perempuan di Bangkalan.
4. Apakah harapan-harapan dari para santriwati dalam upaya peningkatan kualitasnya.
5. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh santriwati dalam melaksanakan tugasnya kelak setelah keluar dari pondok pesantren.

Kelima permasalahan tersebut di atas yang nantinya menjadi dasar wawancara yang akan dilaksanakan sehingga jalannya penelitian lebih terarah sesuai dengan apa yang diinginkan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Gender Melalui Pendekatan tafsir Agama

Dalam bukunya Mansour Fakhrih dikatakan bahwa : "Gerakan Feminisme telah banyak membuktikan minimal menyumbangkan inspirasi pemikiran, bahkan pemahaman terhadap terciptanya yang lebih baik dan lebih adil". Gerakan ini mempunyai pengaruh dan dampak yang cukup luas dalam pandangan gender dalam posisinya di mata masyarakat. Lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori baru ilmu sosial, bahkan juga mempengaruhi pandangan berbagai agama termasuk agamawan untuk melihat dan meninjau kembali pandangan terhadap posisi perempuan selama ini dari sudut pandang agama. Dengan adanya gerakan ini menimbulkan berbagai gugatan terhadap kultur, tradisi yang mendasari kondisi dan peran perempuan diberbagai posisi.

Ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari syariat agama atukah berasal dari kesalahan dalam pemahaman, penafsiran dan pemikiran tentang keagamaan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme maupun pandangan-pandangan lainnya. Dalam konteks ini kita perlu mempertam permasalahan dengan cara melakukan telaah kasus dalam islam yang berhubungan dengan prinsip ideal islam .bagaimana memposisikan islam perempuan.

Masyarakat Islam di Madura mempunyai prinsip bahwa Al-Qur'an sebagai rujukan yang mengakui bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sama. Mereka diciptakan dari satu nafs (*living entity*), dimana keduanya tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Di dalam Al-Qur'an-pun tidak menjelaskan dengan gamblang bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sederajat.

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan, juga dalam hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami atau bapaknya boleh mencampuri hartanya. Kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan ataupun yang diusahakan sendiri. Oleh sebab itu mahar atau mas kawin dibayar oleh laki-laki untuk pihak perempuan sendiri, bukan untuk orang tua dan tidaklah bisa diambil lagi oleh suaminya.

Didalam Al-Qur'an sudah dinyatakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sama lalu dari manakah asal persepsi yang telah menjadikan tradisi dan tafsir keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki.

2.2. Wanita dalam Struktur Sosial

Bangsa Indonesia dewasa ini tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. Salah satu dari komponen pembangunan tersebut adalah kaum perempuan. Struktur sosial selama ini memposisikan perempuan sebagai objek dari pembangunan, karenanya perempuan selalu tertinggal. Salah satu hambatannya adalah stereotipe tentang perempuan, yang menempatkan perempuan selalu dalam posisi nomor dua.

Teoritisi feminis mengungkapkan bahwa adanya hubungan sosial yang timpang, yaitu kaum perempuan berada pada posisi subordinat terhadap kaum lelaki, maka akan “melestarikan” kaum perempuan terbelakang. Padahal secara hukum, perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki di segala bidang. Namun dalam kenyataannya tetap saja perempuan terpinggirkan (Fakih, 1996 : 117). Kemitrasejajaran dalam hidup bermasyarakat tidak terealisasi, karena diskriminasi antara lelaki dan perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki terlalu mengistimewakan kaum lelaki. Perempuan belum dihargai sesuai prestasinya. Stereotip negatif yang melembaga di masyarakat tidak diragukan menjadi hambatan dalam sosialisasi kemitrasejajaran pria dan perempuan, khususnya bagaimana memasyarakatkan pemberdayaan perempuan. Adanya istilah pemberdayaan perempuan mengandung makna bahwa selama ini perempuan mengalami ketidakberdayaan, diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya tentang peran ganda perempuan. Perempuan tetap dianggap lemah walaupun telah menghasilkan ekonomi buat income keluarga. Selain itu, mereka masih harus memanggul beban di sektor domestik, marginalisasi perempuan pedesaan dari sektor pertanian, dan eksploitasi perempuan di pabrik.

Dalam kehidupan masyarakat, perempuan tidak hanya dituntut menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bijaksana, isteri yang setia, anggota masyarakat yang menjadi teladan dan anak gadis yang saleh, patuh serta penurut, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai pencari nafkah yang membantu kehidupan keluarganya di saat-saat diperlukan. Kenyataan ini kadang-kadang sulit diwujudkan karena tuntutan adat dan kebiasaan, yang selalu menempatkan perempuan berada pada posisi yang dipimpin dan harus selalu menempatkan dirinya sebagai pelengkap kaum laki-laki.

Saptari menyebutkan bahwa pada dasarnya peranan perempuan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek intern dan ekstern. Aspek intern berupa peranannya dalam kehidupan keluarga, yaitu mendidik dan memelihara anak-anak serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan

aspek ekstern peranannya di luar keluarga, yakni turut membangun masyarakat sebagai pelaksana pembangunan (Saptari, 1997 : 12).

Dalam buku Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan, Tan menyatakan bahwa dewasa ini perempuan memperoleh kesempatan lebih majemuk. Perempuan bukan semata-mata tampil sebagai anggota keluarga saja, tetapi ia mulai tampil dan berkesempatan memainkan perannya sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan dengan suami, anak, maupun dengan masyarakat luas lainnya (Saptari, 1997: 26). Oleh karenanya, peran perempuan dalam pembangunan bangsa diarahkan pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif dalam masyarakat, stabilisasi nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan ini umumnya ditentukan dan dipengaruhi oleh latar belakang perbedaan dan persamaan laki-laki perempuan yang dijelaskan melalui teori struktural fungsional, teori kekuasaan dan status, teori komunikasi non-verbal, teori *rape-prone* dan *rape-free*, dan teori pembagian kerja. Melalui teori ini akan diketahui faktor penyebab mudah dan sulitnya dilakukan upaya pemberdayaan perempuan dalam suatu masyarakat.

2.3. Teori struktural fungsional

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengklasifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut bekerja di dalam masyarakat.

Dahrendorf, menyebutkan bahwa teori ini menganut beberapa prinsip, antara lain suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian. Sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat dan mekanisme kontrol, perubahan terjadi secara berangsur-angsur dan integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai (dalam Undsey, 2007 : 39).

Harmoni dan stabilitas dalam suatu masyarakat, menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetapi tetap dalam batas yang wajar dan bukan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Boserup (2004) menyebutkan hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih sebagai hubungan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan.

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil mencip-takan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori struktural fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Selanjutnya teori ini menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara itu, ibu-isteri mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidak seimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

Salah satu kritik yang dilontarkan pada teori ini ialah bahwa teori ini terlalu terikat pada kenyataan masyarakat pra-industri. Padahal, struktur dan fungsi di dalam masyarakat kontemporer sudah banyak berubah. Keluarga dan unit rumah tangga telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Kalau dahulu sistem masyarakat lebih bersifat kolektif, dan keluarga pun masih bersifat keluarga besar. Tugas dan tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama oleh keluarga tersebut. Masalah anak tidak hanya diurus oleh ibunya, tetapi oleh semua anggota keluarga yang ramai tinggal di rumah tersebut. Lain halnya dengan keadaan masyarakat sekarang ini, di mana keluarga inti semakin meluas di dalam masyarakat dan sudah menjadi salah satu ciri masyarakat modern.

Sehubungan dengan perubahan struktur keluarga di atas, menarik untuk diperhatikan penelitian Nye (2006: 16) yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi

dan peran suami-isteri kepada lima kelompok, yaitu; 1) segalanya pada suami; 2) suami melebihi peran isteri; 3) suami dan isteri mempunyai peran yang sama; 4) peran isteri melebihi suami, 5) segalanya pada isteri. Apa yang dikemukakan Nye di atas, selain menunjukkan betapa besar perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, juga menunjukkan betapa besar tantangan teori ini di masa mendatang. Pembagian fungsi dan peran antara suami isteri dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seorang laki-laki banyak mengacu pada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan.

2.6. Teori pembagian kerja

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pula pada pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat tradisional dikenal pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu, dan perempuan sebagai pengasuh, maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan menjadi sekretaris dan laki-laki pemimpin. Dalam dunia sains perempuan sebagai operator laboratorium, sedangkan laki-laki sebagai saintis. Urusan produktif seolah-olah menjadi urusan laki-laki dan urusan reproduksi dan kerumahtanggaan adalah tugas perempuan. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

Teori pembagian kerja ini terlihat pula dalam peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai organisasi. Menurut Tavris, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki menurut teori struktural fungsional dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotip gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih sering kali terjadi ketimpangan (Tavris, 2002: 52).

Disadari atau tidak, belum adanya pemberdayaan yang terarah bagi perempuan di Madura menyebabkan keterbelakangan yang berkepanjangan yang dialami kaum perempuan. Oleh karenanya, penanganan dan penanggulangan terhadap hal ini memerlukan strategi dan wahana yang tepat, sehingga mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan. Melalui berbagai

penambahan keahlian dan ketrampilan diharapkan dapat membantu upaya melepaskan perempuan Madura dari keterkungkungan, keterbelakangan, dan beberapa hal lain, yang telah menyebabkan mereka berada pada posisi *marjinal* bila dibandingkan dengan perempuan daerah lain yang ada di Indonesia.

TUJUAN PEMBERDAYAAN SANTRIWATI

3.1. Tujuan Pemberdayaan Santriwati

Berupaya untuk menjawab beberapa permasalahan yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut :

Memberi bekal ketrampilan para santriwati di Bangkalan terhadap upaya peningkatan ketrampilan melalui pemberdayaan perempuan. dalam bermasyarakat.

3.2. Kontribusi Pemberdayaan.

Kegiatan pengabdian ini sangat berguna dalam mengembangkan wawasan bagi pemerhati masalah pemberdayaan wanita, utamanya untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kaum perempuan dapat meningkatkan perannya dalam segala sector. Disamping itu juga ingin memperoleh tentang informasi kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga perempuan tangguh dan mandiri dalam berpartisipasi dibidang ekoomi, social maupun budaya. Dengan pemberdayaan pula maka perempuan akan dapat penempati posisi yang sederajat disamping kaum laki-laki.

Pemberdayaan perempuan khususnya santriwati yang sangat kental dengan ikatan dan kehidupan masyarakat religius keislamannya mempunyai nilai strategis dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kondisi ini dimungkinkan karena perempuan mempunyai peran yang cukup besar dalam pendidikan dan pembinaan moral bagi anak keturunannya, sehingga hal ini dianggap penting mendapatkan perhatian serius bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya dan masyarakat pada umumnya..

Dengan melalui program pemberdayaan perempuan maka akan dapat memberikan tempat yang layak bagi kaum perempuan dalam memainkan peranannya dalam masyarakat. Keberadaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah diperhitungkan dan dibutuhkan sehingga kita pantas memberlakukan perempuan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

PELAKSANAAN PENINGKATAN KETRAMPILAN

4.1. Pemberdayaan Santriwati di Bangkalan

Kondisi pesantren yang pada umumnya beraliran klasik demikian juga terjadi pada kondisi-kondisi pesantren di Bangkalan khususnya kondisi pesantren putri yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sesungguhnya kondisi ini menuju pada model pesantren tradisional atau salaf, dimana pesantren tradisional merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang sangat diperhitungkan mempersiapkan ulama pada masa depan sekaligus sebagai garda terdepan dalam memfilter dampak negative dari pengaruh kehidupan modern/global yang datang dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Istilah pesantren tradisional digunakan untuk menunjukkan cirri-ciri dasar perkembangan pesantren yang masih bertahan dan dipercaya pada corak generasi pertama, dan untuk membedakan dengan sejumlah pesantren yang telah melakukan penyesuaian dengan lembaga-lembaga yang mengklaim dirinya sebagai “pesantren modern”. Dari satu sisi, pesantren tradisional terkenal atau cenderung mempertahankan kegunaan metode pembelajaran tradisional namanya sorogan dan bandongan. Dimana kedua metode ini dalam pelaksanaan belajarnya kiyai aktif dan santri pasif. Secara teknis model sorogan bersifat individu, dimana santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari, sedangkan model bandongan lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti pelajaran dengan duduk sekeliling kiyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah dan terjadwal.

Kiyai sebagai pembaca dan penterjemah, bukanlah sekedar membaca teks, melainkan juga memberi pandangan-pandangan pribadi, baik mengenai isi maupun bahasannya. Kedua metode ini sering dikritisi sebagai terlalu statis dan tradisional. Atau sebagai metode pembelajaran yang mengharuskan para santri diam dan pasif dan tidak berani berbeda pendapat. Kondisi pesantren sebagaimana yang tergambar diatas banyak berkembang di Bangkalan terutama pada pondok putri, mereka masih lebih fanatic dan percaya kepada pengelolaan pondok tradisional. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pondok khususnya terhadap kiyainya masalah sistem pendidikan masih nomer duanya. Oleh karenanya maka banyak masyarakat yang mempercayakan putara-putrinya untuk mengenyam pendidikan dipondok pesantren.

Para orang tua santriwati mempunyai keinginan bahwa setelah putrinya keluar dari pondok pesantren akan menjadi anak yang solehah dan menjadi sur tauladan didalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita lihat jumlah santriwati yang ada di lima pondok pesantren putri dibawah ini:

Tabel 4.1.: Jumlah Santriwati Berdasarkan Pondok Pesantren

No.	Nama Pondok Pesantren	Jumlah/tahun
1.	Al-Hidayah II	260 Orang
2.	Nurul Holil	200 Orang
3.	Syaina Cholil 1	250 Orang
4.	Syaina Cholil 2	250 Orang
5.	Al-Mansyuriyah	200 Orang
	Jumlah	1.160 orang

Sumber: Data primer

Berdasarkan table diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah peminat untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren cukup tinggi dan stabil antara pesantren yang satu dengan yang lain berkisar antara 200 orang – 260 orang setiap pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren cukup besar yang mana kemungkinan terjadi karena setiap pondok pesantren mempunyai visi yang ingin mencetak manusia yang berakhlakul karimah dan berilmu dan beriman.

Keadaan ini haruslah didukung dengan proses penerapan hasil yang diperoleh dari dunia pesantren untuk diterapkan dalam masyarakat. Untuk ini perlu dilakukan pemberdayaan terhadap santriwati sehingga nantinya dapat diterima dalam masyarakat. Namun sebelumnya akan dipaparkan hasil wawancara tentang upaya, harapan dan hambatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap para santriwati sebagai bekal dalam bermasyarakat.

4.2. Upaya Peningkatan Ketrampilan Melalui Pelatihan.

Tuntutan tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada saat ini sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dibiarkan berlarut larut. Kemajuan disegala bidang membuat para perempuan harus bisa berupaya sekuat tenaga untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki agar supaya dapat berperan lebih aktif dan baik dalam masyarakat.

Dalam kehidupan pondok pesantren putri yang mana pada dasarnya mereka perlu peningkatan pendidikan yang setara agar mereka dapat lebih berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya program pemberdayaan sangat perlu

digalakkan agar sisi-sisi kehidupan mereka dapat tersentuh dan bermanfaat. Sedangkan program pemberdayaan yang tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program pelatihan merupakan cara yang paling ampuh untuk meningkatkan ketrampilan para santriwati atau juga bisa dilakukan dengan cara penyetaraan agar peningkatan pendidikan yang berkualitas dapat dikmati oleh kaum perempuan khususnya santriwati yang ada di pondok pesantren putri di Kabupaten Bangkalan. Biasanya pelatihan yang dilakukan agar mereka tidak mengeluarkan biaya disesuaikan dengan program pendidikan dan pelatihan di Departemen Tenaga Kerja sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam beraktifitas dan menyalurkan bakat serta hobinya sehingga menghasilkan dan menunjang ekonomi keluarga khususnya.

4.3. Harapan-harapan Dalam Proses Pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan melalui kuestioner pada umumnya mereka menjawab seperti yang tertera dalam table berikut :

Tabel 4.2.: Harapan Santriwati Dalam Meningkatkan Kualitasnya.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pendidik	300 Orang
2.	Wiraswasta/usaha	470 Orang
3.	Pemda/PNS	109 Orang
4.	Perawat	71 Orang
5.	Ibu Rumah Tangga	210 Orang
	Jumlah	1.160 Orang

Sumber: Data Primer

Dengan melihat data diatas maka membuktikan bahwa para santriwati ingin berperan aktif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Dimana pilihan yang paling banyak dari para santriwati adalah sebagai wirausaha yaitu sebanyak 470 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Wiraswasta/ wirausaha, dimana dunia ini kental dengan jiwa pedagang orang Madura. Pilihan terbanyak kedua jatuh pada jenis pekerjaan sebagai pendidik yaitu sebanyak 300 dan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 210 orang.

Pilihan selanjutnya adalah sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 109 orang, artinya merekapun mempunyai kemauan unt jatuh pada jenis pekerjaan sebagai kepada Negara. Pilihan keempat pada jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu cukup

banyak sesuai dengan nalurnya sebagai wanita yaitu sebanyak 210 orang dan yang terakhir sebagai perawat sebanyak 71 orang.

Posisi tersebut diatas menunjukkan bahwa perkembangan harapan atau keinginan para santriwati di berbagai bidang sudah menjadi perhatian yang harus dibuat sebagai acuan dalam melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian mereka akan sangat merasa diperhatikan atau bahkan diperhitungkan keberadaannya didalam masyarakat. Untuk itu pemberdayaan yang dibutuhkan berdasarkan observasi sementara yang tercermin pada tabel diatas

maka pelatihan yang dibutuhkan antara lain :

- a. Rias Manten.
- b. Menjahit.
- c. Handycraft

Dengan melihat kondisi seperti tabel diatas maka sebagian besar para penentu kebijakan harus mempertimbangkan minat dari para santriwati setelah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Selanjutnya harapan mereka nantinya dapat mandiri dalam berkreaitivitas sesuai dengan minat dan bakat sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Harapan yang pasti dalam kondisi ketika mereka selesai mengenyam pendidikan di pondok pesantren sehingga bisa eksis.

4.4. Hambatan-hambatan Dalam Pemberdayaan Santriwati Dalam Bermasyarakat

Pada dasarnya santriwati yang ada di Kabupaten Bangkalan berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah dan latar belakang pendidikan rendah. Kondisi semacam itu dapat mempengaruhi efektifitas pemberdayaan santriwati dalam bermasyarakat. Disamping masalah ekonomi dan pendidikan masalah kondisi social, budaya ,agama, serta keluarga sangat besar pengaruhnya dalam melakukan program pemberdayaan terhadap santriwati yang ada di Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahini Irawati, S. dkk, *Eksistensi Politisi Wanita Terhadap Kuota 30% di DPRD di Pulau Madura ditinjau dari Kualitas Sumber Daya Manusia*, Riset Dosen Muda, Tahun 2005 tidak dipublikasikan.
- Boserup E, 2004, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- CETRO (Centre For Electoral Reform). 2002. "Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001" (Ringkasan Eksekutif). Jakarta: Divisi Perempuan dan Pemilu. 8 Maret (tidak diterbitkan).
- Dita Indah Sari, *Buruh Perempuan: Kemanusiaan dan Produktivitas yang Sia-sia*, www.jurnalperempuan.com
- Fakih M, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lies Markus, *Hak Perempuan*, www.ranesi.nl.
- Lindsey LL, 1990, *Gender Role: a Sociological Perspective*, New Jersey : Prentice Hall.
- Nye IF, 1996, *Role Structure and Analysis of the Family*, California : Sage Library of Social Research.
- Pudjiwati S, 1993, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Saptari R, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Grafiti.
- Tavris C, 2002, *Mismeasure of Woman*, New York : Touchstone.
- Usman S, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta* Pustaka Pelajar.
- Undesey at all 2007, *Behaviour of Social*, Roston London
..... *Inpres No. 9 Tahun 2000*